

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal telah menetapkan kebijakan dan program pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Informal yang mencakup bidang garapan dan sasaran yang meluas seiring dengan adanya kebijakan penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: No 67 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Ditjen PAUDNI menetapkan kebijakan dan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Masyarakat, Kursus dan Pelatihan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI, serta program Pengkajian, Pengembangan dan Pengendalian Mutu Pendidikan serta program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Teknis lainnya.

Kebijakan dan program Ditjen PAUDNI Tahun 2011 ini diarahkan untuk memenuhi tuntutan peningkatan kualitas layanan dengan tetap berupaya terus mendorong ketersediaan dan akses layanan pendidikan yang semakin luas.

Salah satu upaya konkrit untuk mengimplementasikan kebijakan dan program Ditjen PAUDNI Tahun 2011 tersebut adalah dengan mendorong dan memotivasi terwujudnya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau *Community Learning Centre*. Hal ini sangat membutuhkan dukungan kinerja

pengelola PKBM. Dalam konteks ini pengelola PKBM perlu mengoptimalkan pengelolaan program PKBM sehingga kebijakan dan program Ditjen PAUDNI dapat dilaksanakan dengan baik.

Kinerja pengelola PKBM antara lain ditunjukkan dengan adanya komitmen pendidik untuk bekerja dengan baik dalam melakukan perencanaan, melaksanakan serta melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap program PKBM yang dilaksanakan. Dalam konteks yang bersamaan pendidik PAUDNI perlu secara intensif melatih, membimbing dan membina tenaga pendidik PAUDNI agar dapat menguasai kompetensi yang diharapkan. Dengan melakukan hal ini maka kinerja pengelola PKBM dapat berjalan dengan baik.

Namun demikian selama ini kinerja pengelola PKBM menjadi salah satu bahan sorotan masyarakat karena dinilai kurang optimal dalam menjalankan fungsi dan perannya. Hal tersebut yang selanjutnya menjadi alasan bagi pentingnya peningkatan kinerja pengelola PKBM sehingga dapat mengelola program PKBM dengan baik.

Terkait dengan rendahnya kinerja pengelola PKBM maka secara kelembagaan PKBM perlu melakukan pembenahan sehingga kinerja pengelola PKBM dapat ditingkatkan secara optimal. Upaya yang dapat dilakukan oleh PKBM antara lain dengan menjadwalkan kegiatan pelatihan kepada pengelola PKBM secara intensif sehingga setiap pengelola PKBM dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Dalam konteks yang bersamaan pengelola PKBM perlu diberikan motivasi sehingga kompetensinya mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini pada gilirannya akan mampu meningkatkan kinerja didik secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil pengamatan awal yang dilakukan terkait kinerja pengelola PKBM di Kabupaten Pohuwato, menunjukkan bahwa secara umum kinerja pengelola PKBM belum mencapai tingkat yang diharapkan. Kondisi riil yang terjadi bahwa kinerja pengelola PKBM kurang baik yang ditunjukkan oleh kurangnya kecakapan dalam membuat perencanaan program PKBM. Sebagian pengelola PKBM terlihat kurang memahami tupoksinya khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan program PKBM. Hal tersebut diduga merupakan manifestasi dari rendahnya kinerja pengelola PKBM dalam melaksanakan tugasnya. Terkait kondisi tersebut maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian guna mengkaji melalui penelitian yang diformulasikan dengan judul : “ Studi Tentang Kinerja Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Pohuwato ”.

1.2 Identifikasi Masalah

Masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kinerja pengelola PKBM belum mencapai tingkat yang diharapkan.
2. Pengelola PKBM kurang cakap dalam membuat perencanaan program PKBM.
3. Sebagian pengelola PKBM terlihat kurang memahami tupoksinya khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan program PKBM.
4. Program PKBM tidak dapat dijalankan sesuai dengan program karena ketidakmampuan pengelola dalam mengoptimalkan layanan

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada kinerja Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Pohuwato.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana Kinerja Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Pohuwato? ”

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Pohuwato.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoretis

Hasil penelitian secara teoretis diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Menganalisis tentang perlunya peningkatan kinerja pengelola PKBM .
- 2) Memfungsikan PKBM sebagai wadah pengembangan program PKBM sehingga mengoptimalkan layanan kepada warga belajar.
- 3) Memperkaya kajian yang berhubungan dengan masalah pendidikan non formal

1.6.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberi motivasi pada pengelola PKBM untuk mengembangkan PKBM menjadi wadah yang berfungsi memfasilitasi pengembangan kinerja pengelola PKBM dalam mengaktualisasikan tugas-tugasnya.
2. Menjadi salah satu acuan dalam mengembangkan pengelola PKBM sehingga memudahkan mereka dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
3. Bagi peneliti lain dapat mengembangkan penelitian ini pada populasi yang lebih besar sehingga diperoleh hasil kajian pengembangan dalam upaya untuk mengembangkan kinerja pengelola PKBM.